



Pemkot Bentuk Tim Dampingi TPA Piyungan

JOGJA -- Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta akan membentuk tim untuk mendampingi pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Piyungan yang kini ditangani Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Pemerintah DIY perlu didampingi tim dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemerintah kabupaten lain yang memanfaatkan tempat pembuangan sampah tersebut agar pengelolannya berjalan lebih baik," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Suyana di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, tim tersebut akan membantu pengelolaan sampah yang belum bisa dilakukan secara maksimal oleh pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, seperti memantau pengelolaan saluran air. Selama ini, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan

anggaran yang cukup besar untuk membayar biaya retribusi pembuangan sampah ke TPA Piyungan sehingga pemerintah menuntut agar pengelolaan tempat pembuangan sampah tersebut dilakukan dengan baik.

"Bagaimanapun juga, kami yang membutuhkan agar pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan baik. Salah satunya memenuhi standar penilaian Adipura," kata Suyana.

BLH Kota Yogyakarta menilai bahwa pengelolaan sampah di TPA Piyungan yang terletak di Kabupaten Bantul belum dilakukan secara maksimal karena banyak permasalahan lingkungan yang muncul. Salah satu permasalahan yang harus segera ditangani adalah menekan populasi lalat yang berkembang tidak terkendali. Populasi lalat

>> KE HAL 15

Pemkot Bentuk

Sambungan dari halaman 9 yang sangat banyak tersebut salah satunya dipengaruhi oleh mekanisme pembuangan sampah yang masih dilakukan secara "open dumping".

Pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah, lanjut Suyana, minimal dilakukan dengan cara "controlled landfill" yaitu menutup sampah dengan tanah sehingga tidak menurunkan kualitas lingkungan. "Selama masih dilakukan

dengan cara 'open dumping', maka kualitas lingkungan akan terus turun. Kami berharap, ada semacam pembagian zona di TPA Piyungan yaitu zona yang pasif untuk menutup sampah dengan tanah dan zona yang aktif untuk pembuangan sampah," katanya.

Pengelolaan sampah dengan cara "open dumping" sangat mempengaruhi penilaian Adipura sehingga pada 2013 dan 2014, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak menerima Adipura. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005